

**AUDIT MANAJEMEN ATAS FUNGSI KEUANGAN PADA
KANTOR INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S Al Baqarah: 113)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. *(Q.S Al Insyirah:6-8)*

“Ibu atau wanita adalah sekolah bila kamu memepersiapkannya berarti kamu sedang mempersiapkan bangsa yang baik keturunannya”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT. Atas rahmat yang diberikan.
- Ibu, Bapak, serta kakak tersayang yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan.
- Teman-teman terkasihku, nert-nertku serta seluruh pihak yang selalu men-support dan menyertai.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Audit Manajemen atas Fungsi Keuangan pada Kantor
Inspektorat Daeah Kota Makassar".

Nama Mahasiswa : Serlinawati
No. Stambuk / NIM : 105730540915
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

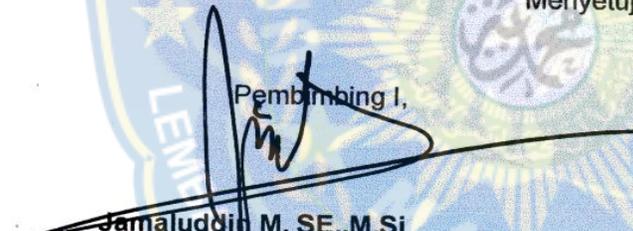
Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

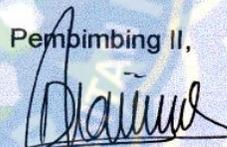
Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Jamaluddin M. SE., M.Si
NIDN : 2008117201


Khadijah Darwin. SE., M.Ak
NIDN : 0909099202

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ismail Badollari., SE., M.Si., Ak., CA., CSP.
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Serlinawati, NIM : 105730540915, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Dzulhijjah 1440 H

31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif, SE, Msi, Ak (.....)
2. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE, M. Ak (.....)
3. Sitti Zulaeha, S.Pd, M. Si (.....)
4. Dr. Edi Jusriadi, SE, MM (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Serlinawati
 Stambuk : 105730540915
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan Judul : Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Pada Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

METERAI TEMPEL : Pernyataan
 13BB7ADF094492544
 6000 ENAM RIBURUPIAH
 Serlinawati

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rosulong, SE., MM
 NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si, Ak. CA. CSP
 NBM: 1073428

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpaha rahmat dan karunianya skripsi yang berjudul **“Audit Manajemen atas Fungsi Keuangan pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar”** diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras Penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat dari bantuan orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing Penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan teima kasih kepada :

1. Prof. DR. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan beserta seluruh Staf Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA.CSP selaku ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M. SE.,M.Si dan Ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu Penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Kedua Orang Tuaku serta Saudara-Saudara ku Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang.
7. Pimpinan serta Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar yang telah memberi izin meneliti sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan baik.
8. Buat Teman-teman Akuntansi VII Angkatan 2015 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu Penulis selama ini namun tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang di sebabkan oleh keterbatasan Ilmu maupun minimnya pengalaman Penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritikan dan sarann yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang Penulis terima dan berbagai Pihak dibalas oleh Allah *subhanahu wata'alan* dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah disisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridha dari-Nya.

Makassar, 2019

Penulis

ABSTRAK

SERLINAWATI, Tahun 2019 AUDIT MANAJEMEN ATAS FUNGSI KEUANGAN PADA KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR”. Dibimbing oleh bapak Jamaluddin selaku pembimbing I dan Ibu Khadijah Darwin selaku pembimbing II. Audit manajemen merupakan suatu teknis yang secara teratur dan sistematis yang digunakan dalam menilai ke efektifan unit atau pekerjaan dibanding dengan standar, dimana proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten serta independen dan dapat menghimpun serta mengevaluasi bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu identitas yang diperuntukkan bagi manajemen. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari objek penelitian yang telah diolah dalam bentuk dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta manajemen Inspektorat Daerah Kota Makassar agar dapat meningkatkan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengendalian manajemen dibidang keuangan dan akuntansi.

Kata Kunci: manajemen, Tahapan Audit, Keuangan

ABSTRACT

SERLINAWATI, 2019. *management audit of financial function at the Makassar City Regional Inspectorate Office*". Guided by Mr. Jamaluddin as supervisor I and Mrs. Khadijah Darwin as supervisor II. Management audit is a technical that is regular and systematically used in assessing the effectiveness of the unit or work compared to standards, where the process is taken by someone who is competent and independent and can collect and evaluate evidence about measurable information from an identity that is intended for management. Research uses qualitative descriptive research methods. The data is obtained from primary data through interview and data secondary is data obtained from research objects that have been processed in the form of document and archives relating to this research.

This research is expected to be input for the government and management of the Makassar City Inspectorate in order to improve the planning, implementation and management control systems in the financial and accounting fields.

Keyword: Management, Audit Stages, Finance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
1. Audit Manajemen	6
2. Prinsip Sistem Pengendalian Manajemen	19
3. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen	19
4. Fungsi Keuangan	20
5. Objek Audit	24

B. Tinjauan Empiris.....	27
C. Kerangka Konsep.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis penelitian	30
B. Lokasi dan waktu Penelitian	30
C. Sumber data.....	30
D. Teknik pengumpulan data.....	31
E. Teknik Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah.....	39
C. Hasil Penelitian	39
D. Gambaran Umum Fungsi Keuangan.....	40
E. Pembahasan	46
F. Analisis data	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel2.1	Peneliti Terdahulu	27
Tabel4.1	Hasil Rivew dan Pengujian Pengendalian Manajemen atas Fungsi Keuangan	50
Tabel 4.2	Ringkasan Pemeriksaan Mendalam Fungsi Keuangan	52



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar2.1	Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1	Stuktur Organisasi	37



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Transkrip Wawancara	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi dan pengendalian manajemen menimbulkan aktivitas audit (pemeriksaan). Audit juga dibutuhkan dalam menilai pertanggungjawaban manajemen kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap instansi pemerintah. Dari hasil audit pula dapat diketahui apakah laporan yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau apakah operasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan instansi pemerintahan.

Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi pemerintahan. Berbagai jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi di dalam instansi pemerintahan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu Audit manajemen juga merupakan investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan bawah serta pembuatan laporan audit mengenai efektifitasnya kegiatan organisasinya. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, jadi dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktifitas pada pemerintahan tersebut. (Bayangkara, 2016)

Adapun Fungsi keuangan merupakan fokus perhatian pada aktiva dan passiva pemerintahan, dengan penekanan dan pembuatan keputusan lebih fokus pada masa depan. fungsi dasar manajemen keuangan, adapun mengenai dasar manajemen merupakan tanggungjawab dan tugas para manajer keuangan berbeda dari satu instansi pemerintahan ke instansi pemerintahan lainnya. Namun perbedaan itu hanya bersifat nuansa karena besaran ke pemerintahan lainnya. Tugas pokok manajer keuangan menyangkut dalam pengambilan keputusan.

Audit manajemen atas fungsi keuangan merupakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa manajemen memegang peranan penting dan bahkan strategi dalam kehidupan pemerintahan, sama halnya dengan audit pada fungsi lainnya, sasaran dari audit ini adalah menilai efektivitas satuan kerja yang mengurus keuangan pemerintahan dengan nama atau satuan kerja, seperti departemen, divisi, dan bagian lainnya.

Pembinaan atas penyelenggara pemerintahan daerah menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Lembaga Pengawasan terdiri atas lembaga pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan internal terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Lembaga Pengawasan eksternal terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain kedua bentuk pengawasan tersebut, juga dikenal dengan pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan oleh masyarakat sebagai *social control* apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisasi bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota).

Adapun fungsi keuangan untuk beroperasi secara efisien dan efektif tersebut, keadaan justru bertolak belakang dengan melahirkan konsekuensi yang tidak diharapkan, dalam arti tidak tercapainya tujuan fungsi keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi akibat tidak searah dan tidak saling mendukung antara bagian-bagian dan person-person dalam organisasi dari manajemen fungsi keuangan akan sasaran dan tujuan fungsi itu sendiri dan tujuan organisasi keseluruhan, serta asumsi yang paling buruk adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan perencanaan, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam fungsi keuangan.

Dengan demikian, maka akan menjadi hal yang sangat baik untuk memotivasi akan pentingnya diadakan audit manajemen atas suatu pemerintah atas fungsi keuangan tersebut. Audit manajemen hadir untuk melihat aspek operasi suatu pemerintah atas fungsi tertentu dan bagaimana penerapan audit manajemen/audit manajemen hadir untuk melihat kelemahan-kelemahan dalam operasi suatu instansi pemerintah atau fungsi tertentu kemudian diberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan-

kelemahan yang ditemukan, hingga nantinya diharapkan target dan tujuan instansi pemerintah dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul : “Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar”. Agar dapat mengetahui sejauh mana peran audit manajemen dalam meningkatkan pelaporan pada kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu bagaimana peran audit manajemen atas fungsi keuangan pada kantor inspektorat daerah kota makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui audit manajemen atas fungsi keuangan pada kantor inspektorat daerah kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk digunakan sebagai bahan informasi dan masukan-masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang kajian tentang Audit Manajemen atas Fungsi Keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan suatu pemikiran bagi pihak pemerintah agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya dapat melaksanakan perannyasebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberi masukan (*consultingassurance*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Audit Manajemen

Audit manajemen memberikan nilai tambah terhadap fungsi keuangan suatu instansi pemerintahan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaan/pengawasannya akan memberikan pendapat mengenai pelaporan keuangan.

Audit manajemen menurut Bayangkara (2016:2) adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi instansi pemerintahan.

Maulana Yusuf (2014:59) Audit Manajemen dapat digunakan dalam memastikan seberapa baik manajemen, dalam hubungan eksternal dengan efisiensi internal maupun pihak luar.

Sementara itu, Audit Manajemen menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya auditing (pemeriksaan akuntan) oleh KAP (2004:175) bahwa :audit manajemen merupakan operasional audit, audit sistem, dan audit fungsional ialah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu pemerintahan, termasuk kebijakan operasional serta kebijakan akuntansi yang sudah ditentukan manajemen, dalam mengetahui apakah kegiatan operasi sudah dilakukan secara, efisien dan efektif.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai audit manajemen yang dikemukakan dapat dirangkum bahwa: Audit Manajemen merupakan suatu teknis yang sistematis serta secara teratur digunakan dalam menilai

keefektifan suatu instansi pemerintah/pekerjaan yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Adapun fungsi pengawasan serta pengendalian manajemen, dapat menimbulkan aktivitas audit pemeriksaan, secara lebih dalam audit pula dibutuhkan untuk menilai pertanggung jawaban manajemen di berbagai pihak yang sangat membutuhkan dalam pemerintahan. Audit manajemen adalah mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi instansi pemerintah. (ahcmad, 2008:5)

hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi/apakah operasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan, peraturan serta kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

a. Tujuan dan manfaat audit manajemen

Tujuan audit manajemen yang dikemukakan IBK Bayangkara (2017:4) yaitu:

- 1) Untuk menilai keandalan laporan keuangan.
- 2) Untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap
- 3) hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur.
- 4) Menilai pengendalian internal organisasi.
- 5) Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- 6) Program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi.

Adapun audit manajemen bertujuan dalam mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai

perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada instansi pemerintah tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, disamping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

b. Ruang lingkup serta Sasaran Audit Manajemen

Dalam ruang lingkup audit manajemen dapat meliputi semua aspek kegiatan manajemen, ruang lingkup ini juga dapat pula berupa semua kegiatan/dapat pula hanya mencapai bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan, periode pun bervariasi bisa dalam jangka waktu satu minggu, beberapa bulan, satu tahun dan bahkan dalam beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin tercapai.

Adapun yang menjadi sasaran untuk audit manajemen merupakan aktivitas, kegiatan, program, serta bidang-bidang dalam pemerintahan yang diketahui/diidentifikasi masih dapat memerlukan peningkatan atau perbaikan, dapat dilihat dari segi, efisiensi, serta efektivitas. Berikut ada 3 elemen pokok dalam tujuan audit :

1) Kriteria (criteria)

Kriteria adalah standar pedoman, norma pada setiap individu atau kelompok di dalam instansi pemerintah untuk dapat melakukan aktivitasnya.

2) Penyebab (cause)

Adapun Penyebab adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam instansi pemerintah. Penyebab

dapat bersifat positif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi serta efektifitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

3) Akibat (effect)

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa program/aktivitas telah terselenggarakan secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.

c. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan

Audit manajemen dirancang untuk menemukan penyebab dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program/aktivitas pemerintah, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut dan menentukan tindakan perbaikan (rekomendasi) yang berkaitan dengan kelemahan tersebut agar dicapai perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

Berbeda dengan audit keuangan yang menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi yang dibuat instansi pemerintah, audit manajemen dilakukan dengan lingkup yang lebih luas yang keseluruhan aspek manajemen dari objek yang di audit.

Adapun perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan menurut IBK Bayangkara (2017:8) adalah sebagai berikut:

1) Tujuan audit

Audit manajemen ditujukan untuk mencapai perbaikan atas berbagai program/aktivitas dalam pengelolaan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan.

2) Ruang lingkup audit

Ruang lingkup audit keuangan berkisar pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek audit, ruang lingkup manajemen meliputi keseluruhan fungsi manajemen dan unit-unit terkait yang ada di dalamnya.

3) Dasar yuridis

Audit keuangan mengharuskan penyajian laporan keuangan Audit manajemen bukan suatu keharusan.

4) Pelaksana audit

Audit keuangan dilakukan dalam rangka mendapatkan pengeahan (opini) secara independen dari pihak auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen pemerintahan tersebut. Audit manajemen dilakukan dalam rangka untuk menemukan berbagai kekurangan/kelemahan pengelolaan instansi pemerintah (melalui pengelolaan berbagai program/aktivitas) yang dilakukan manajemen, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

5) Frekuensi audit

Audit keuangan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun

dan bersifat reguler. Audit manajemen tidak ada ketentuan mengikat yang mengharuskan untuk melakukan audit setiap periode waktu tertentu.

6) Orientasi hasil audit

Audit keuangan dilakukan terhadap data-data keuangan instansi pemerintah yang bersifat historis. Oleh karena itu, audit ini telah menekankan pada penilaian terhadap kinerja masa lalu yang telah dicapai manajemen pada periode pelaporan. Audit manajemen telah menekankan sudutnya untuk kepentingan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

7) Bentuk laporan audit

Audit keuangan telah memiliki standar bentuk laporan audit yang bersifat baku bagi seluruh akuntan independen yang melakukan audit keuangan. Laporan hasil audit biasanya disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat komprehensif, dimana di dalam laporan tersebut disamping menyampaikan kesimpulan hasil audit, juga disajikan temuan-temuan penting hasil audit yang menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan dan rekomendasi.

8) Pengguna laporan

Laporan audit keuangan ditujukan kepada berbagai kelompok pengguna yang berbeda diluar pemerintahan (eksternal). Laporan audit manajemen lebih ditujukan kepada pihak internal pemerintah.

d. Karakteristik audit manajemen

Adapun audit manajemen mempunyai beberapa karakteristik penting, Karakteristik tersebut meliputi :

1. Tujuan pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua perangkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi.

2. Independensi

Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat, dicapai maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen.

3. Pendekatan sistematis

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten.

4. Kriteria prestasi

Dengan kriteria prestasi pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi.

5. Bukti pemeriksaan

Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya.

6. Pelaporan dan rekomendasi

Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi

untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen.

e. Prinsip dasar audit manajemen

Ada tujuh prinsip yang harus diperhatikan oleh auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan dengan baik menurut bayangkara (2011:5) yang menyebutkan tujuh prinsip dasar, yaitu :

1. Audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki.
2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit
3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif.
4. Idebtifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi.
5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab.
6. Pelanggaran hukum.
7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan.

f. Yang melakukan audit manajemen

Pihak-pihak yang bisa melakukan audit manajemen (Elvira,2011:17) adalah :

1. Internal auditor

Internal auditor yang bekerja untuk pemerintahan tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan instansi pemerintah tersebut.

2. Akuntan pemerintah

Akuntan pemerintah dapat juga melakukan pemeriksaan manajemen mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen.

3. Akuntan publik

Instansi Pemerintah juga bisa menunjukkan sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau instansi pemerintah tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal kurang keahliannya dalam area tertentu.

g. Tahap-tahap audit manajemen

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima, menurut bayangkara (2011:9), menyebutkan ada lima tahapan, yaitu :

1. Audit pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang di audit. Disamping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang di audit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial yang mengandung kelemahan pada instansi pemerintah yang di audit, dari informasi latar belakang ini, auditor dapat menentukan tujuan audit sementara (*tentative audit objective*). Dalam tahap ini auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara.

2. Review dan pengujian pengendalian manajemen

Pada tahapan ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit instansi pemerintah, hasil pengendalian pengujian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit sesungguhnya (*definitive audit objective*), atau mungkin ada beberapa tujuan audit sementara yang gugur, karena tidak cukup (sulit memperoleh) bukti-bukti untuk mendukung tujuan audit tersebut.

3. Audit terinci

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antar satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji pemerintah yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam satu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan.

4. Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif (penyajian temuan-temuan penting) hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi). Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti.

5. Tindak lanjut

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.

h. Laporan hasil audit

Hasil akhir audit manajemen adalah laporan hasil audit. Laporan hasil audit manajemen pada umumnya berisi penjelasan mengenai tujuan dan ruang lingkup penugasan, prosedur dan pendekatan yang digunakan oleh pemeriksa, temuan-temuan dan hasil pemeriksaan hendaknya meliputi dan disusun secara berurutan sebagai berikut :

1. Informasi latar belakang

Informasi latar belakang yang disajikan oleh pemeriksa harus dapat memberikan gambaran latar belakang permasalahan yang sama diantara pemeriksa dan pengguna laporan. Informasi tersebut antara lain :

- a. Kapan organisasi itu didirikan.
- b. Apa tujuan pendirian organisasi, pelaksanaan kegiatan atau tujuan program.
- c. Apa karakteristik kegiatan dan seberapa luas ruang lingkup aktivitasnya.
- d. Siapa yang mengepalai organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau program.
- e. Alasan apa yang mendasari dilakukannya audit manajemen.

2. Kesimpulan audit yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung tujuan audit.

3. Rumusan saran yang berhasil diformulasikan

Saran-saran yang diajukan oleh pemeriksa pada umumnya berupa anjuran yang berisikan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan

untuk mendorong organisasi melakukan perbaikan atas kinerja yang akan datang. Rumusan saran harus singkat karena tujuan untuk memberikan dasar perbaikan prestasimanajemen yang akan datang, dirumuskan dengan mengingat prinsip biaya efektifitas serta sifat praktis.wewenang untuk melakukan tindak lanjut dan upaya perbaikan tetaplah pada manajemen organisasi.

4. Lingkup pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan menunjukkan berbagai aspek kegiatan pihak kedua dan periode waktu kegiatan yang ditinjau kembali oleh pemeriksa. Lingkup pemeriksaan harus juga mengidentifikasi secara jelas seberapa mendalam peninjauan kembali yang dilakukan untuk masing-masing aspek kegiatan pihak kedua. Laporan ntersebut hendaknya dapat memberikan motivasi kepada unit manajemen yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang disajikan dalam laporan tersebut.

2. Prinsip sitem pengendalian manajemen

Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat mrnjamin bahwa pemerintahan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. (IBK Bayangkara, 2017:32)

3. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik

Sistem pengendalian manajemen yang baik memiliki hal-hal berikut (IBK Bayangkara, 2017:32):

- a. Pernyataan tujuan pemerintahan
- b. Rencana pemerintahan yang digunakan untuk mrncapai tujuan.
- c. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan pemisahan fungsi yang memadai.
- d. Sitem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi.
- e. Sistem penelaahan yang efektif pada setiap arus aktivitas guna memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan prkatek yang sehat telah dilaksanakan dengan baik.

4. Fungsi keuangan

a. Pengertian fungsi keuangan

Fungsi keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam instansi pemerintah. (Achmad, 2008:15) fungsi keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penentuan investasi jangka panjang sebuah pemerintah, mendapatkan dana untuk membayar, dan memimpin kegiatan keuangan harian sebuah pemerintah. (Elvira, 2011:23). Fungsi keuangan adalah harus menjamin adanya sistem yang sama untuk menyusun kegiatan dan biaya-biaya yang terjadi diluar kegitan pokok pemerintahan.

Dari ketiga pengertian tentang fungsi keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi keuangan adalah salah satu bidang yang

berhubungan dengan penentuan investasi, pendapatan dana, dan pemimpin kegiatan keuangan harian instansi pemerintah.

Keuangan suatu pemerintah berkaitan dengan pengelolaan penggunaan dana dan pengelolaan sumber-sumber. Semakin efisien penggunaan dana, tentunya semakin baik bagi pemerintahan. Fungsi keuangan berusaha menyediakan kebutuhan untuk operasi pemerintah sehingga *maximizing profit* (memaksimalkan keuntungan) dapat terlaksana.

Satuan kerja yang menangani keuangan dalam pemerintahan mengumpulkan, mencatat, dan meninjau beberapa ragam data yang diperolehnya dari berbagai satuan serta bidang fungsional lainnya dalam perusahaan, baik yang bidang fungsionalnya bersifat kegiatan maupun yang bersifat penunjang.

Fungsi keuangan itu sendiri bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan pemerintahan, kemudian mengatur penggunaan dari dana yang telah diperoleh. Sumber dana yang dibutuhkan terdapat dari berbagai sumber, dari sumber dana intern yang berasal dari dalam pemerintahan maupun sumber dana ekstern yang berasal dari luar instansi pemerintahan. Sumber dana intern adalah merupakan dana yang telah dihasilkan oleh bagian pemasaran sebagai akibat dari transaksi penjualan yang telah dilakukan dalam proses pemasaran. Sedangkan sumber dana ekstern adalah berasal dari masyarakat umum yang dalam hal ini berupa pembelian saham oleh masyarakat kepada saham-saham yang telah dikeluarkan atau diemisikan oleh perusahaan tersebut.

b. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan

Adapun tujuan dan fungsi manajemen keuangan sebagai berikut:

1. Mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai

Tujuan utama dari fungsi keuangan adalah untuk menilai kebutuhan dan perolehan dana bagi pemerintah secara tepat. Untuk itu pemerintahan seharusnya mengandalkan lebih banyak modal permanen seperti modal penyertaan untuk menghindari beban bunga dan kewajiban untuk membayar pokok pinjaman.

2. Penggunaan dana dengan tepat

Mendapatkan dana adalah sesuatu yang sangat penting. Penggunaan dana secara tidak tepat menyebabkan tidak maksimalnya kontribusi dana yang dimiliki, karena terjadi potensi manfaat yang hilang.

3. Meningkatkan profitabilitas

Keuntungan adalah tujuan terpenting dari seluruh aktivitas bisnis pemerintahan. Fungsi keuangan juga harus menyesuaikan biaya dan pengembalian yang dapat diperoleh dari dana tersebut.

4. Memaksimalkan Nilai Pemerintahan

Tujuan terakhir dari fungsi keuangan pemerintahan merupakan memaksimalkan nilai pemerintahan yang merefleksikan maksimal kesejahteraan para pemegang sahamnya. Nilai pasar dari saham adalah merupakan suatu indikator dari tingkat kesejahteraan pemiliknya.

Menurut Harmono (2011) pengaruh manajer keuangan instansi pemerintah saat ini telah memiliki fungsi keuangan yang lebih luas, yaitu :

1. Kegiatan investasi dalam berbagai jenis aktiva. mendapatkan kombinasi keuangan yang optimal yang berhubungan dengan berbagai jenis penilaian kinerja pemerintahan. Bentuk-bentuk kinerja diantaranya berkaitan dengan penentuan ukuran perusahaan, laba operasi pemerintah, risiko bisnis, dan penentuan tingkat likuiditas pemerintah.
2. Menentukan strategi pendanaan dalam rangka mendanai aktivitas-aktivitas investasi dan kegiatan operasional instansi pemerintah dengan memperhatikan tingkat-tingkat moment ungit (leverage) optimal, yaitu mencermati kondisi permintaan pasar dan fortfolio investasi optimal dengan mencermati efisiensi dan aktivitas operasi instansi pemerintah, didukung oleh pengelolaan sumber dana utang, khusus utang jangka panjang.
3. Dalam bentuk pemerintahan besar maupun sedang, fungsi keuangan adalah sebagai alat utama dalam proses pembentukan keputusan dengan alasan sebagai berikut :
4. Bagian keuangan memberikan petunjuk yang berarti untuk meningkatkan siasat keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang.
5. Pengarahan dan dukungan dapat juga diberikan oleh departemen keuangan dalam membantu mencapai sasaran laba bersih untuk periode yang berjalan.

6. Sehari-hari fungsi keuangan memainkan peranan penunjang dalam bidang yang penting seperti strategi biaya. Fungsi keuangan harus menyediakan sistem yang memadai untuk mengumpulkan data biaya operasi dan data biaya non operasi.

c. Prosedur pengendalian fungsi keuangan

Prosedur pengendalian dapat ditetapkan pada suatu jenis transaksi atau ditetapkan secara luas dan diintegrasikan dalam komponen tertentu lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi. Prosedur pengendalian fungsi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Otorisasi yang semestinya serta transaksi dan kegiatan.
2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai.
3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
4. Perlindungan yang memadai atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan dan catatan.
5. Pengecekan secara independen dan pelaksanaan dan penilaian yang semestinya terhadap jumlah yang harus dicatat.

5. Objek audit

ada empat hal yang menjadi objek audit, untuk dapat mencapai sasaran audit fungsi keuangan ialah :

- a. Sasaran yang pertama ialah menilai efektifitas satuan kerja yang mengurus keuangan dan nama serta nomenklatur apapun satuan kerja itu dikenal: divisi, biro, departemen, bagian serta nomenklatur lain yang sama, tergantung pada sistem pemerintahan serta struktur organisasi, dalam memberikan arah dan pengendalian keuangan pada

pemerintahan sebagai keseluruhan termasuk satuan kerja serta bidang fungsional yang terdapat didalamnya.

- b. Adapun langkah kedua ialah mencari fakta serta informasi tentang efisiensi kerja intern satuan kerja yang mengurus keuangan pemerintahan dengan meninjau praktek-praktek keuangan satuan kerja itu, sepanjang menyangkut standar manajemen keuangan, prosedur akunting serta prosedur penyusunan anggaran. agar dapat tercapai sasaran tersebut, maka program audit manajemen atas fungsi keuangan perlu diarahkan pada :

1. Sasaran finansial pemerintahan

Dalam proses tersebut ialah pencarian, penentuan serta pengumpulan informasi tentang tercapainya sasaran finansial pemerintah. Sedangkan proses yang kedua ialah audit harus ditujukan kepada pencarian, penemuan dan pengumpulan informasi menyangkut posisi finansial masing-masing satuan bisnis/bidang fungsional yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan. Terdapat dua pertimbangan kenapa hal ini penting ialah:

- a) Untuk menjamin bahwa para manajer yang memimpin berbagai komponen pemerintahan memahami serta menaati kebijakan finansial yang ditetapkan oleh manajer keuangan.
- b) Guna menjamin posisi keuangan berbagai satuan kerja/bidang fungsional memperkuat posisi finansial pemerintahan sebagai keseluruhan.
- c) Untuk memeriksa apakah tujuan serta berbagai sasaran pemerintahan memenuhi berbagai persyaratan, kelayakan, dan

kewajaran, serta dapat di pertanggungjawabkan secara moral serta etika/tidak dan sebagainya, serta untuk menemukan fakta apakah berbagai komponen pemerintahan memenuhi standar kerja yang telah ditentukan atau tidak.

2. Perencanaan keuangan

adapun proses audit manajemen dengan cermat harus menganalisa perencanaan fungsi keuangan. Audit atas mekanisme perencanaan keuangan mengharuskan pemberian pendapatan apakah unit mampu/tidak menunjang sasaran utama. Dalam tahap perencanaan proses audit harus dengan menilai efisien serta efektifitas rencana induk departemen. Rencana induk departemen merupakan teknik untuk meneruskan pada tingkat menengah atau lebih rendah dalam organisasi serta unit departemen.

- c. Sasaran ketiga adalah legitimasi keuangan dalam pemerintahan terlihat pada kedudukan fungsi tersebut pada struktur organisasi seluruh pemerintahan. agar fungsi keuangan dapat memberikan bantuan yang berharga. Jadi audit manajemen atas fungsi keuangan yaitu: proses ini untuk memeriksa struktur organisasi pemerintahan untuk melihat apakah fungsi keuangan bebas dari kegiatan unit yang lain. Proses kedua ialah menganalisis keefektifan organisasi bagian keuangan dengan membandingkan rencana organisasi dengan kemampuan organisasi.
- d. Sasaran ke empat ialah pimpinan satuan kerja dibidang keuangan selalu turut dalam pengambilan keputusan strategi pemerintahan dalam satuan kerja dibidang keuangan dapat bekerja secara

independen dengan bantuan serta nasihat yang diberikannya dan diterima oleh para manajer lain dalam lingkungan instansi pemerintah, serta diperlakukan sejajar dengan komponen lain, baik komponen yang menyelenggarakan tugas pokok maupun tugas penunjang.

Oleh karena itu audit manajemen atas fungsi keuangan harus ditujukan kepada: audit manajemen keuangan harus dengan cermat mengamati hal-hal yang potensial menjadi permasalahan dimasa depan baik yang bersumber dari satuan kerja ataupun yang berasal dari berbagai komponen yang terdapat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Dan audit manajemen harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cermat kepada kelompok analisa anggaran serta keuangan agar relevan.

B. Tujuan Empiris

Tabel 2.1

Tabel Peneliti Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Djohariah Sarapa, (2017)	Audit Manajemen atas Fungsi Keuangan	Metode analisis komparatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hipotesis bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan dalam arti kata audit manajemen atas fungsi keuangan belum memenuhi kriteria atau standar yang berlaku karena penelitian yang berlaku masih banyak penyimpangan sehingga menimbulkan audit manajemen kurang

				efektif dan efisien.
2	Nurisca Puji Lestari, Kusni Hidayati, Nova Retnowati (2017)	Penerapan Audit Manajemen Fungsi Keuangan Sebagai Sarana Pengambilan Keputusan Yang Efektif	Analisis kualitatif deskriptif	Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya fungsi keuangan dilembaga ini sudah memadai hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian tugas yang jelas.
3	Rr, Indah Mustikawati, Randi Maipan, (2012)	Audit Manajemen atas Fungsi Produksi	Metode analisis dekriptif kualitatif	Aktivitas fungsi produksi mulai dari jadwal induk produksi, perolehan bahan baku, tingkat produk cacat, perawatan peralatan dan fasilitas produksi, pengembangan angkatan kerja, dan aktivitas pengepakan dan penyimpanan, produk jadi secara umum telah dilaksanakan dengan baik
4	Siti Nurul Nurima, Syafi'i, Widy Susanti,	Audit Manajemen dalam Fungsi Keuangan untuk Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan	Metode analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa ratio dan quick ratio mengalami penurunan sehingga belum bisa dikatakan efektif. Untuk ratio mengalami peningkatan nilai rasio sehingga dapat dikatakan efektif. simpulaan dari penelitian adalah penyalahgunaan pada manajemen keuangan.
5	Ni Made Wulan Sari Sanjaya, (2013)	Penerapan Audit Manajemen Keuangan pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Sc Singaraja	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem fungsi keuangan yang dilakukan pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia SC Singaraja meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerapan audit manajemen sudah

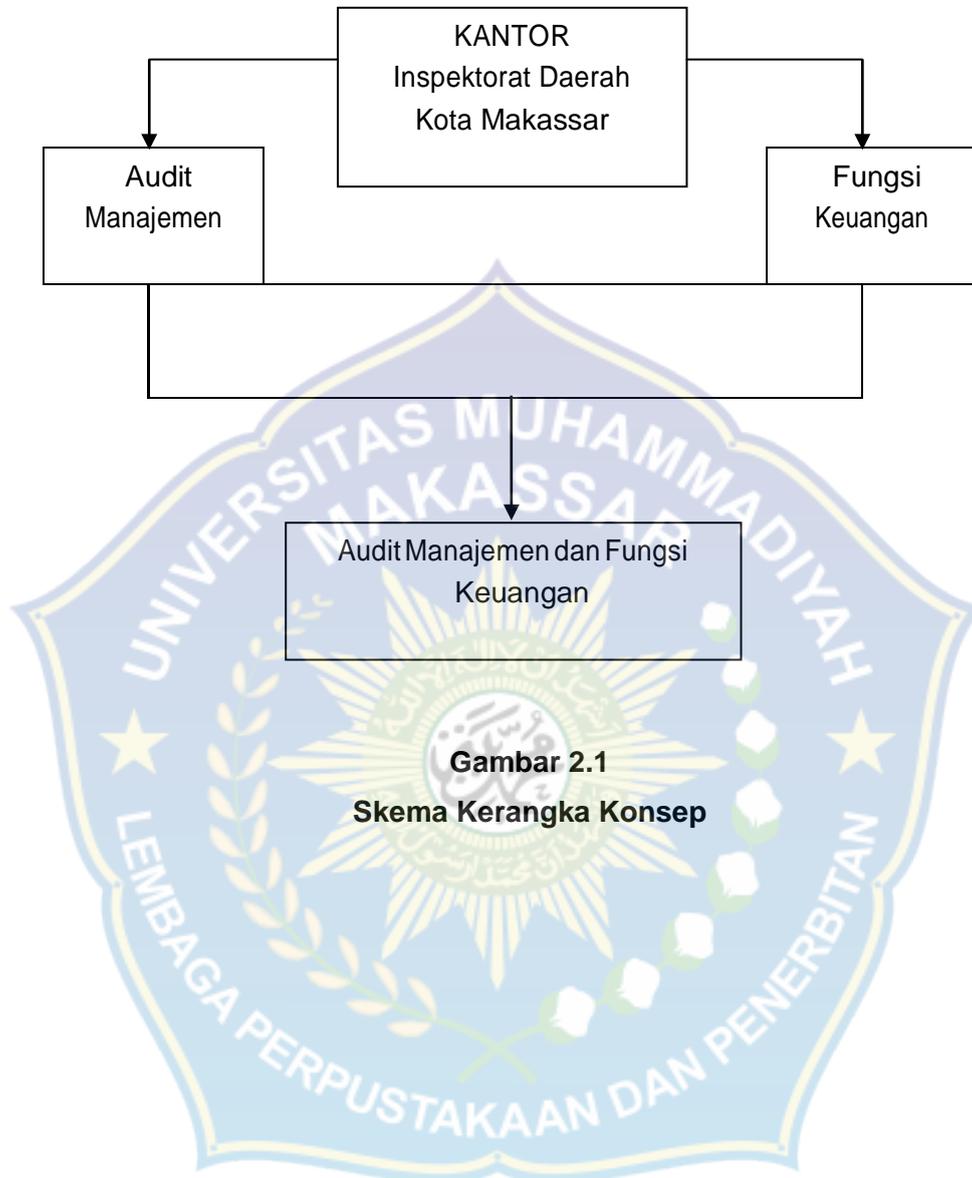
				dilakukan dengan baik, berdampak positif bagi kegiatan keuangan PT. Coca-Cola Bottling Indonesia SC Singaraja sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konsep

Kantor inspektorat daerah kota makassar merupakan kantor yang bergerak dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan daerah kota makassar dari semua instansi di daerah kota makassar. Audit manajemen suatu cara untuk melihat aspek operasi atau pemerintah atas fungsi tertentu serta hadir untuk melihat kelemahan-kelemahan dalam operasi suatu instansi pemerintah atau fungsi tertentu kemudian diberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

Audit yang dilakukan inspektorat ialah audit berkala atau sewaktu-waktu maupun audit terpadu atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja. Kemudian, inspektorat juga dapat melakukan jasa audit lainnya ialah menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas atas kinerja pemerintah daerah serta melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan peran audit variable dependent yaitu mengenai audit manajemen atas fungsi keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya bisa berupa penjelasan dari kepala bidang yang bersangkutan langsung terhadap kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan, *job description* dan struktur organisasi pemerintahan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah kantor inspektorat daerah kota makassar. Yang berlokasi di Jln. Teduh bersinar No. 7. makassar. Dimana kantor inspektorat daerah kota makassar yang bergerak dibidang pemeriksaan dan pengawasan, waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan, mulai bulan juni sampai juli 2019.

C. Sumber data

Adapun Sumber data berasal dari :

1. Data primer yaitu, data yang bersumber dari objek penelitian langsung, data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan langsung atau pengajuan pertanyaan kepada kepala bidang pemerintahan yang bersangkutan.

2. Data sekunder yaitu, data yang bersumber dari objek penelitian yang sudah terolah dalam bentuk dokumen-dokumen atau arsip-arsip pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari catatan-catatan, atau dokumen-dokumen yang terdapat di pemerintahan misalnya tupoksi, struktur organisasi, serta pembagian tugas dan tanggungjawab pada masing-masing bagian pada kantor inspektorat daerah kota makassar.

3. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga peneliti menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi teori-teori dan data-data penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek atau subjek yang diteliti, dengan tujuan menggambarkan

secara sistematis, dengan menjelaskan tahapan audit manajemen, yaitu sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan latar belakang mengenai semua aspek organisasi kegiatan program untuk diperiksa agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan.

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Tujuan dilakukannya review dan pengujian pengendalian manajemen ini untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tujuan pemeriksaan sementara yaitu, kondisi, kriteria dan rekomendasi dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi pemerintahan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen.

3. Pengujian Terinci

Tahap ini dimaksudkan bagaimana auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten, material dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai pemerintahan dan bagaimana akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecil akibat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pemerintahan.

4. Pengembangan Laporan

Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus diriview oleh manajer audit sebelum didiskusikan dengan audit. Komentar dari audit mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporann harus diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Inspektorat Daerah Kota Makassar

Sejak terbentuknya inspektorat daerah wilayah dari ujung pandang sudah ada pegawai yang di angkat khusus oleh menteri dalam negeri yang disebut pegawai “dipekerjakan”, dan sebelum berlakunya otonomi daerah terdapat 3 jenis pegawai yang ditempatkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat diperbantukan (DPB) dan pegawai pusat dipekerjakan (DPK).

Inspektorat wilayah dari ujung pandang pada awal berdirinya dipimpin oleh seorang kepala untuk pertama kalinya dipimpin oleh Bapak Drs. H. Umar Gazali yakni tahun 1979-1981. Kemudian digantikan oleh Bapak Drs. H. Andi Mappaewang. Beliau menjabat selama dua tahun yakni sampai tahun 1981-1982.

Pada tahun 1982-1985 kepala inspektorat wilayah dari ujung pandang dijabat oleh Bapak Drs. H. Andi Ampa Uleng. Tahun 1985-1989 inspektorat wilayah kodya dari ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. Basuki Iskandar. Selanjutnya dalam tahun 1989-1995 inspektorat wilayah kodya dari ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. H. BR. Idrus Sitaba.

Masa selanjutnya, inspektorat wilayah dari ujung pandang dipimpin oleh Drs. Muh. Husni Majid sampai dengan tahun 1997. Kemudian di tahun 1997-2000 jabatan kepala inspektorat digantikan oleh Bapak Drs. Tandeng Tugi dengan masa jabatan selama kurang lebih

empat tahun yang selanjutnya di tahun 2000 inspektur wilayah dari ujung pandang dijabat oleh Bapak Drs. Alimuddin Wellang sampai dengan tahun 2002. Periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak H. Andi Baso Bachtiar sampai dengan tahun 2005. Setelah itu inspektorat wilayah kodya dari berubah nomenklatur menjadi badan pengawas daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota makassar nomor 15 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah kota makassar.

Pada saat perda nomor 17 tahun 2005 tersebut diberlakukan, kepemimpinan pada inspektorat daerah kota makassar selanjutnya dengan sebutan inspektur dijabat oleh Bapak Drs. H. Hamsiar, M.Si. hingga bulan desember tahun 2013.

Kepemimpinan sebagai inspektur daerah kota makassar selanjutnya yakni tahun 2014 atau selama 1 tahun dijabat oleh bapak Drs. Muslim yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Drs. Zaenal Ibrahim, M.Si dan sampai saat ini yang sebelumnya juga bertugas sebagai inspektur pembantu pada inspektorat daerah kota makassar.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan profesional.

b. Misi

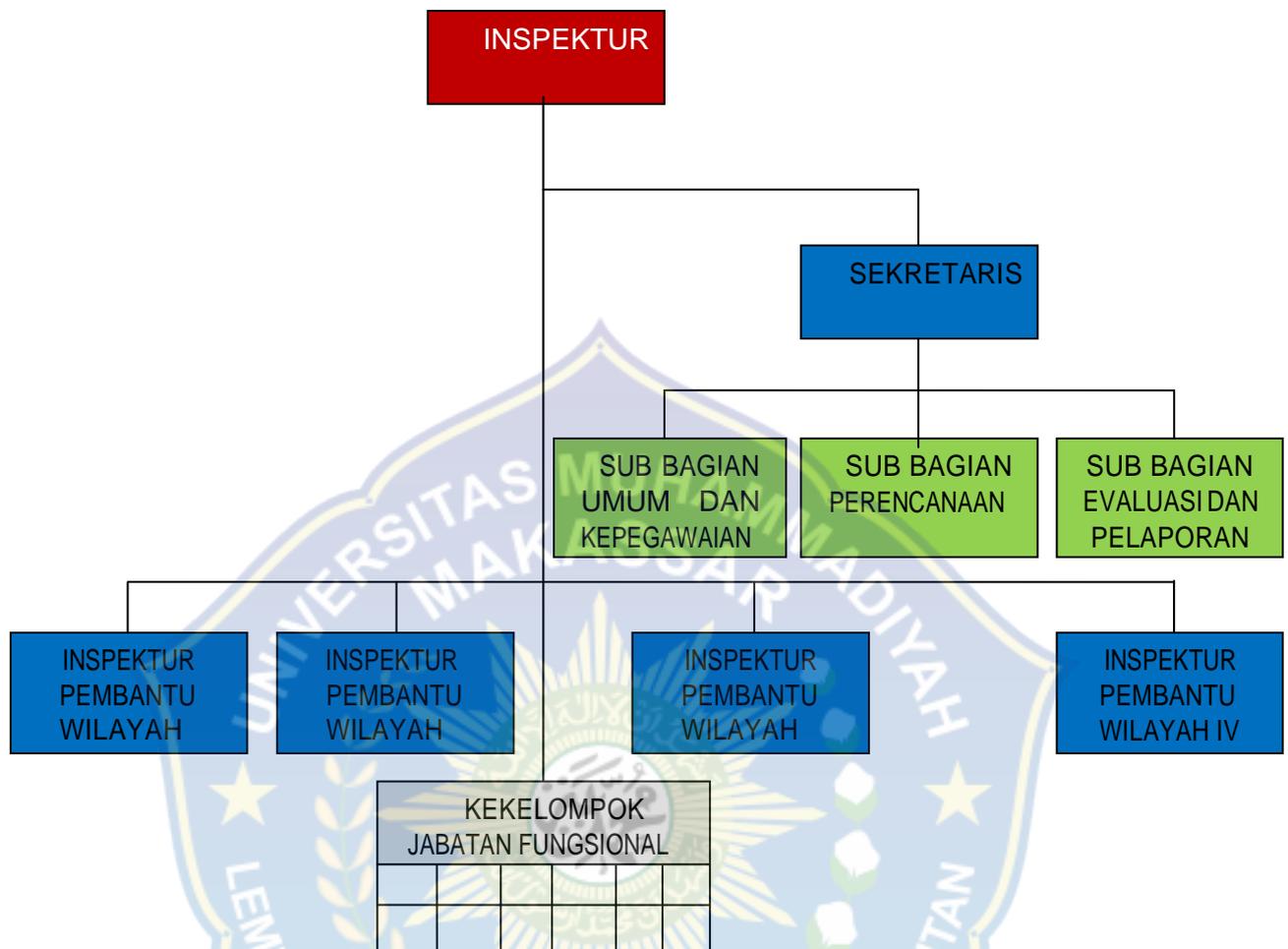
Terwujudnya pengawasan internal pemerintahan daerah kota makassar yang efektif.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting, karena menyangkut tugas dan tanggungjawab para pegawai yang ada di dalamnya. Struktur organisasi dibuat agar maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik.

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Bagian-bagian yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Sesuai dengan peraturan daerah kota makassar no. 5 tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja inspektorat kota makassar maka struktur organisasi inspektorat daerah kota makassar terdiri dari inspektur, sekretaris, sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, sub bagian administrasi umum, inspektur pembantu wilayah dan jabatan fungsional. Adapun gambaran struktur organisasi inspektorat daerah kota makassar adalah sebagai berikut;



Gambar 4. 1
Struktur Oganisasi

4. Uraian pekerjaan

a. Inspektur

Inspektur daerah kota makassar mempunyai tugas pokok pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua satuan

organisasi dalam lingkup inspektorat di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada inspektur.

c. Sub bagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketata usahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan.

d. Sub bagian perencanaan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-perundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

e. Sub bagian evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

f. Inspektur pembantu wilayah

Inspektur wilayah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

g. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

B. Gambaran umum standar akuntansi pemerintah (SAP)

Adapun gambaran umum standar akuntansi pemerintah adalah pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkan penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta ada karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan sebelumnya ialah pada pasal I undang-undang nomor 17 Tahun 2003 dikemukakan bahwa:

1. Pendapatan negara/daerah ialah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja negara/daerah yaitu kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

C. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengikuti tahapan audit manajemen atas fungsi keuangan pada kantor inspektorat daerah kota makassar dimulai

dengan melakukan survei pendahuluan (*Relimenary Survey*). Penulis dalam memperoleh data-data melalui survei pendahuluan yang bersumber dari hasil wawancara kepada sub kepala bagian yang bersangkutan pada kantor inspektorat daerah kota makassar yang dimulai pada tanggal 29 juli 2019. Berikut ini adapun temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan survei pendahuluan yaitu apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor, maka pihak kantor tidakmelaporkannya kepada yang bersangkutan

D. GambaranUmum Fungsi Keuangan

Adapun sistem keuangan pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar pada umumnya terdiri dari berbagai entitas akuntansi serta entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan suatu perangkat kerja pada kota makassar, selaku pengguna anggaran serta Satuan Kerja Pengelolaan keuangan pada pemerintah Kota Makassar yang mengelola anggaran, kewajiban, serta kekayaan yang menyelenggarakan akuntansi serta dapat menyajikan laporan keuangan serta laporan realisasi anggaran pada dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Entitas pelaporan ialah pemerintah kota makassar yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan melaksanakan keuangan serta laporan anggaran yang bertujuan umum terdiri laporan keuangan.

Adapun peranan laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun dalam menyediakan informasi yang relevan menurut posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan, terutama laporan keuangan digunakan dalam mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi suatu entitas pelaporan, operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan laporan keuangan merupakan tujuan laporan pemerintah kota Makassar sebaiknya menyajikan informasi yang lebih bermanfaat atas para pengguna untuk menilai akuntabilitas serta membuat keputusan seperti keputusan ekonomi, politik, serta sosial yaitu:

- a. Dapat menyediakan informasi menurut posisi keuangan serta kondisi entitas laporan berkaitan dengan sumber-sumber penerima, seperti jangka panjang ataupun jangka pendek yang termasuk yang berasal dari pungutan pajak serta pinjaman.
- b. Untuk menyediakan informasi menurut perubahan atas posisi keuangan entitas laporan, apakah sudah mengalami kenaikan/ penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
- c. Menyediakan informasi menurut bagaimana entitas laporan pendanaan semua kegiatan serta mencukupi kebutuhan kas.
- d. Dapat menyediakan informasi tentang alokasi, sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan.
- e. Menyediakan informasi menurut jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas laporan serta hasil yang sudah tercapai.
- f. Untuk menyediakan informasi menurut kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai semua pengeluaran.

Komponen-komponen laporan keuangan ialah:

a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran ialah menyediakan informasi menurut anggaran serta realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran, serta pembiayaan dari suatu entitas laporan, informasi tersebut sangat berguna bagi para pengguna laporan untuk dapat mengevaluasi keputusan menurut alokasi dan sumber daya ekonomi, akuntabilitas serta ketaatan entitas laporan terhadap anggaran karena dapat menyediakan informasi-informasi berikut yaitu:

- 1) Pertama Informasi menurut realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan untuk hal efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.
- 2) Kedua yaitu Informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Adapun laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menyajikan pos-pos sebagai berikut, ialah; saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelum, serta saldo anggaran lebih akhir dalam periode berjalan, Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, laporan saldo anggaran lebih, dimaksudkan dalam memberikan ringkasan pada pemanfaatan saldo anggaran serta pembiayaan pemerintah. sehingga suatu entitas laporan wajib menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang

terdapat didalam laporan saldo anggaran lebih seperti atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota yang tidak memiliki perbedaan.

c. Neraca

Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas laporan menurut aset, kewajiban, serta ekuitas atas tanggal tertentu, Struktur neraca pemerintah pusat memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan struktur neraca pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, perbedaan tersebut diakibatkan akibat kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset daerah. Berikut jenis-jenis aset, kewajiban serta ekuitas dan pengakuan serta pengukur pada neraca dapat diuraikan yaitu:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi serta sosial dimasa depan dapat diharapkan dan diperoleh, baik seperti pemerintah ataupun masyarakat, dan dapat pula diukur untuk satuan uang, seperti sumber daya non keuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa atas masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah serta budaya.

berikut neraca aset terbagi menjadi 2, ialah;

a) Aset lancar

Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, serta persediaan.

b) Aset tidak lancar

Aset tidak lancar adalah aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode laporan, yang terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang serta aset tidak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung/tidak langsung dalam kegiatan pemerintah ataupun yang digunakan oleh masyarakat umum.

c) Aset tetap terdiri dari;

Tanah, peralatan serta mesin, gedung serta bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi untuk pekerjaan.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah dalam jangka pendek ialah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila diharapkan dibayar untuk waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Adapun kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar untuk waktu diatas dua belas bulan.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah selisih antara aset serta kewajiban pemerintah atas tanggal pelaporan, Saldo ekuitas dineraca berasal dari saldo akhir ekuitas atas pelaporan perubahan ekuitas.

d. Laporan operasional

Adapun laporan operasional adalah menyediakan informasi menurut seluruh kegiatan operasional keuangan entitas laporan yang tercerminkan untuk pendapatan laporan operasional, beban, serta surplus atau defisit operasional dari suatu entitas laporan yang penyajiannya disamakan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan serta pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan, investasi, transitoris, serta operasi. Pemerintah pusat serta daerah yang menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas dalam setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

f. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas dapat menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit laporan operasional atas periode yang bersangkutan serta koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan mendasar.

g. Catatan atas laporan keuangan

berdasarkan informasi untuk laporan keuangan pemerintah dapat dipahami serta digunakan oleh pengguna untuk melakukan evaluasi serta menilai pertanggungjawaban keuangan negara yang diperlukan atas

catatan pada laporan keuangan. Adapun susunan catatan laporan keuangan sebagaimana untuk standar akuntansi pemerintah yaitu:

- a. Informasi umum tentang entitas laporan serta entitas akuntansi
- b. Kebijakan fiskal atau keuangan serta ekonomi makro yaitu: kebijakan akuntansi yang penting, ikhtisar pencapaian target keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan, kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan yang pernyataan standar akuntansi pemerintah oleh suatu entitas laporan, basis pengukuran yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan,
- c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan yaitu: pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum dipaparkan untuk lembar laporan keuangan.
- d. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

E. Pembahasan

Berdasarkan gambaran motivasi kerja pegawai kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar, berikut digunakan analisis deskriptif.

1. Survei pendahuluan

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar bagian keuangan serta anggaran yang dimulai pada tanggal 29 juli 2019 oleh bapak Henra Cipta kepala sub bagian administrasi dan umum ialah:

- a) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama ialah, "apakah seluruh pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas serta tanggungjawab?, adapun

responden menjawab bahwa seluruh pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah melaksanakan tugas serta tanggungjawab mereka masing-masing.

- b) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua ialah: “apakah dalam penyusunan anggaran penerimaan serta pengeluaran sudah didukung data-data yang akurat?, responden menjawab dalam penyusunan anggaran penerimaan serta pengeluaran sudah didukung data-data yang akurat serta tepat.
- c) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan ke tiga ialah: “apakah ada jadwal pertemuan antara kepala sub bagian serta divisi lain atas penyusunan perencanaan tahunan?, responden menjawab ada jadwal pertemuan antara kepala sub bagian serta divisi lain atas penyusunan perencanaan tahunan.
- d) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan ke empat ialah: “bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor apakah pihak kantor melaporkannya atas pihak yang bersangkutan?, responden menjawab pihak kantor tidak melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan apabila terjadi dengan kondisi keuangan kantor.
- e) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan ke lima ialah: “apakah data serta laporan yang dibuat oleh pegawai keuangan sudah tepat?, responden menjawab data serta laporan yang dibuat oleh pegawai keuangan sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
- f) Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan ke enam ialah: “apakah rasio pertumbuhan kantor sudah meningkat?,

responden menjawab rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat.

2. Review serta Pengujian Pengendalian Manajemen

Adapun tahap selanjutnya untuk penelitian ini dengan mengikuti tahapan audit manajemen atas fungsi keuangan atas kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar ialah dapat melakukan review serta pengujian pengendalian manajemen kantor. Dengan tujuan dapat menilai efektivitas pengendalian manajemen untuk mendukung tercapainya tujuan kantor, berdasarkan hasil pengujian ini, penulis dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku atas kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar. Kemudian dengan lebih mudah dapat diketahui hal-hal yang dapat terjadi seperti: kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan.

Adapun hasil review serta pengujian pengendalian manajemen pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar yaitu:

- a. Adapun jumlah pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar berjumlah sebanyak 84 orang pegawai
- b. Kantor juga sudah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas karena disertai dengan *job description* oleh masing-masing kegiatan
- c. Kantor juga memiliki tugas serta fungsi yang secara rinci dapat menguraikan alur kerja setiap sub bagian pada kantor
- d. Seluruh pegawai kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing.
- e. Adapun penyusunan laporan keuangan kantor selalu dapat dikeluarkan tepat waktu sesuai aturan dan prosedur yang berlaku pada kantor.

- f. Dalam penyusunan anggaran penerimaan serta pengeluaran sudah didukung data-data yang akurat, seperti kerangka acuan data.
- g. Pihak kantor tidak melaporkannya kepada yang bersangkutan apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor.
- h. Adapun jadwal rutin pertemuan antara sub bagian serta divisi lainnya dalam penyusunan perencanaan tahunan kantor.
- i. Berdasarkan hasil wawancara rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat.

Tabel 4.1

HASIL REVIEW DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN ATAS FUNGSI KEUANGAN PADA KANTOR
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Kekuatan-keuatan sistem pengendalian	
1.	Adapun jumlah pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar berjumlah sebanyak 84 pegawai
2.	Kantor juga sudah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dan disertai dengan <i>job description</i> oleh masing-masing kegiatan
3.	Kantor pun memiliki tugas dan fungsi (TUPOKSI) yang secara rinci menguraikan alur kerja setiap sub bagian pada kantor
4.	Adanya <i>job description</i> yang memadai pada fungsi keuangan
5.	Seluruh pegawai kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah melakukan tugasnya masing-masing

Sumber : Hasil wawancara

Kelemahan-kelemahan sistem pengendalian			
No.	Kelemahan-kelemahan sitem pengendalian	Kesalahan yang dapat terjadi	Pengujian yang dapat ditempuh
1.	Pihak kantor tidak melaporkannya kepada yang bersangkutan, apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor	Apabila tidak dilaporkan kepada orang yang bersangkutan jika terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan, maka suatu instansi khususnya dibagian keuangan akan selalu terjadi masalah, karena pegawai yang bertugas melaporkan kondisi keuangan akan selalu melakukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan apabila tidak duketaahui oleh pihak yang bersangkutan	Seharusnya pegawai yang dibagian keuangan melaporkan kepada orang yang bersangkutan jika terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan
2.	Rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat	Apabila rasio kantor tidak meningkat, maka kantor tidak akan mengalami perkembangan disetiap tahunnya	Kepala kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar, berusaha membina serta mengawasi pegawainya untuk melaksanakan pekerjaannya, agar rasio

			pertumbuhan kantor dapat meningkat setiap tahunnya
--	--	--	--

Sumber : Hasil wawancara

3. Pemeriksaan mendalam (Terperinci)

Kegiatan ini adalah hal signifikan pada pemeriksaan yang memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pada kelemahan-kelemahan yang ditemukan, selain menyajikan kondisi serta kriteria yang ada dalam pemeriksaan mendalam sebagai berikut:

a. Study lapangan

Adapun study lapangan mempunyai banyak perwujudan dalam operasional, adapun wawancara dengan personil inti manajemen, mengidentifikasi sumber-sumber ekstern, dan observasi aktivitas operasional.

b. Analisa

Analisa sistem pengendalian sistem manajemen disertai analisa penyimpangan serta pengukuran kegiatan, pendiskusian temuan serta perkembangan alternative, rekomendasi serta saran terhadap pemerintah. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap fungsi keuangan Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Adapun evaluasi terhadap pengendalian manajemen pada anggaran pemerintah, pada dasarnya kegiatan analisis ini masih berada dalam konteks pemeriksaan mendalam. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai ialah bahwa aspek pengndalian anggaran serta fungsi keuangan telah tercapai, jadi informasi yang diperoleh selama

dalam pemeriksaan manajemen dapat dipercaya sebagai acuan untuk membuat interpretasi atas pengendalian manajemen. Salah satu instrumen keuangan yang efektif digunakan dalam evaluasi terhadap pengendalian anggaran ialah analisa selisih (*variance analysis*).

Tabel 4.2

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PEMERIKSAAN MENDALAM FUNGSI KEUANGAN

No	Kondisi	Kriteria	Rekomendasi
1.	Pihak kantor tidak melaporkannya kepada yang bersangkutan, apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor.	Apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor, seharusnya pihak kantor melaporkannya kepada yang bersangkutan.	Pihak kantor perlu melaporkan kepada yang bersangkutan jika terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor, agar suatu instansi khususnya sub bagian keuangan dapat beroperasi dengan baik tanpa ada masalah.
2.	Rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat	Jika rasio kantor tidak meningkat, maka kantor tidak akan mengalami perkembangan disetiap tahunnya	Kepala kantor perlu membina serta mengawasi pegawainya untuk melaksanakan pekerjaannya, agar rasio pertumbuhan kantor dapat meningkat setiapa tahunnya.

Sumber : Hasil wawancara

4. Laporan Audit Manajemen

Adapun tahap akhir penelitian terhadap fungsi keuangan kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar, yang menggunakan alat analisis deskriptif dengan tahapan audit manajemen sebagai berikut:

a. Informasi umum serta latar belakang kantor

Inspektorat Daerah Kota Makassar telah menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan program, sekaligus dapat membantu walikota untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan daerah untuk penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengkoordinasian pengelolaan keuangan, serta pengendalian dan pengawasan keuangan yaitu:

- 1) Keputusan menteri dalam negeri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, serta pengurusan keuangan dan tata cara penyusunan APBD dalam melaksanakan tata usaha keuangan daerah serta penyusunan perhitungan APBD.
- 2) Dapat meningkatkan efisien, efektivitas, dalam pengawasan keuangan daerah.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

b. Tujuan umum pemeriksaan

- 1) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam kegiatan keuangan
- 2) Untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.
- 3) Menilai kegiatan operasional yang dilakukan oleh fungsi keuangan.

c. Ruang lingkup pemeriksaan

berikut ruang lingkup pemeriksaan fungsi serta tugas bagian keuangan serta akuntansi pada Inspektorat Daerah Kota Makassar. Pemeriksaan ini mencakup pengumpulan data serta analisis data yang berkaitan dengan fungsi keuangan kantor, sebagai berikut:

1. Peraturan walikota makassar nomor 12 tahun 2014
2. Struktur organisasi dan *job description*
3. Tugas pokok serta fungsi pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.
4. Hasil wawancara kepada kepala sub bagian administrasi dan umum terkait penelitian ini.

d. Prosedur yang digunakan

Audit manajemen yang dilakukan peneliti ialah wawancara dengan manajemen serta karyawan yang terpilih dalam fungsi keuangan. Peneliti pun meninjau serta mengevaluasi dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip, serta berbagai kebijakan yang peneliti anggap penting. Setelah mengamati daya yang ada. Peneliti memerlukan beberapa hal yang dapat mengakibatkan kegiatan tersebut tidak efisien serta efektif.

e. Temuan-temuan

Setelah peneliti melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fungsi keuangan serta bagian yang terkait, maka peneliti memperoleh ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan kegiatan tersebut tidak terlaksana secara efisien serta efektif, yaitu peneliti menemukan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor maka

pihak kantor tidak melaporkannya kepada yang bersangkutan, dan rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat.

F. Analisis data

Adapun analisis data untuk menguji dan membuktikan data yang diperoleh dari pemerintahan peneliti akan melakukan analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan yang berbentuk uraian kalimat/laporan untuk dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa perbandingan yaitu membandingkan audit manajemen yang diterapkan pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan atas pengamatan serta data-data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan program kerja serta keberadaan fungsi keuangan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Makassar belum berjalan secara efisien serta efektif. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem perencanaan pelaksanaanserta pengendalian manajemen dalam bidang keuangan.

Berikut penerapan audit manajemen menurut teori fungsi keuangan yaitu:

1. Audit manajemen merupakan suatu tinjauan yang secara sistematis untuk digunakan menilai efektifitas unit/pekerjaan dibanding dengan standar-standar pemerintahan serta industri dengan menggunakan lingkup objek yang dapat dianalisa dalam meyakinkan manajer bahwa tujuannya dilaksanakan serta keadaan yang dibutuhkan perbaikan.
2. Adapun tujuan audit ialah untuk mengevaluasi kegiatan pemerintahan dalam hubungan yang menetapkan standar efisiensi serta efektivitas.

- a. Efisiensi bertindak dengan cara dapat meminimalisir kerugian/pemborosan SDM dalam melaksanakan/menghasilkan sesuatu.
 - b. Efektifitas suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya dengan baik dapat ditinjau dari segi kualitas kerja, serta kuantitas.
3. Fungsi keuangan dalam suatu organisasi ialah mengumpulkan, menganalisa data dari seluruh kegiatan fungsional dalam pemerintahan, pada dasarnya setiap unit kegiatan membutuhkan biaya.
 4. Ruang lingkup audit manajemen meliputi suatu program fungsi atau kondisi keseluruhan dari suatu organisasi yang mempunyai batasan yang biasanya dilakukan mengingat terbatasnya dana yang disediakan untuk mendanai proses audit.
 5. Kertas kerja audit ialah catatan informasi yang diperbolehkan serta bukti-bukti yang dikumpulkan dalam pemeriksaan selama audit berjalan.
 6. Laporan hasil audit adalah suatu laporan yang mengandung uraian mengenai kegiatan apa yang dilakukan, mana yang perlu mendapatkan perbaikan/rekomendasi yang diusulkan.

Berdasarkan analisa penerapan audit manajemen atas fungsi keuangan menurut teori, fungsi keuangan harus berjalan dengan efektif serta efisien agar dapat memenuhi standar. Sedangkan yang diterapkan dalam pemerintahan belum memenuhi standar serta belum berjalan secara efektif dan efisien. perbandingan dari penelitian terdahulu penulis dapat menyimpulkan bahwa masih belum memenuhi standar serta belum berjalan secara efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit manajemen atas fungsi keuangan kantor inspektorat daerah kota makassar belum berjalan secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian manajemen dalam bidang keuangan.
2. Fungsi keuangan harus berjalan dengan efektif serta efisien agar dapat memenuhi standar, sedangkan yang diterapkan dalam pemerintahan belum memenuhi standar serta belum berjalan secara efisien dan efektif.

B. Saran

1. Kepala Sub Bagian Keuangan kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar harus lebih membina pelatihan, peningkatan mutu atau keterampilan pegawai.
2. Pihak kantor harus melaporkan kepada pihak otoritas agar tidak terjadi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, (2008), audit manajemen terhadap fungsi keuangan dan fungsi produksi, jurusan manajemen, STIEM Bongaya Makassar.
- Bayangkara, IBK, (2016), *Audit Manajemen prosedur dan implementasi*, edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Bayangkara, IBK, (2017), *Audit Manajemen prosedur dan implementasi*, cetakan keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Harmono , (2011), *manajemen keuangan*, cetakan kedua, bumi aksara, Jakarta.
<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2019/31/07/gambaran-umum-sap-berbasis-akrua1-pp-712010/s>
<https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/laporan-perubahan-saldo-anggaran-lebih/>
- Ismet Ismayanti, (2014), *Audit Manajemen atas fungsi keuangan*, jurusan akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar, tidak dipublikasikan.
- Lestari Puji Nurisca, Hidayati Kusni, Retnowati Nova, 2017. Penerapan Audit Manajemen Fungsi Keuangan Sebagai Sarana Pengambilan Keputusan Yang Efektif Pada Yayasan Lagzis Peduli Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Bayangkara Surabaya. Vol. 3, No.2.
- Mustikawati Indah Rr, Maipan Randi, 2012. *Audit Manajemen Atas Fungsi Produksi Pada PT. Nusantara VI Aro Kerinci*, Jambi Jurnal Nominal dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 1, Nomor 1.
- Nurima Nurul Siti, Syfi'i, Susanti Widya. *Audit Manajemen dalam Fungsi Keuangan untuk Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan PT.Bank Tabungan Negara (Persero)*, Tbk Surabaya, Fakultas Ekonomi Univesitas Bhayangkara Surabaya.
- Peraturan Walikota Makassar No.12 Tahun 2014.
- Siagian, P.Sondang, (2001), *Audit Manajemen*, bumi aksara, Jakarta.
- Sarapa Djoharia, 2017. *Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Pada PT. Megahputra Sejahtera Makassar* Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis dan Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi LPI Makassar. Vol. 1, No. 2.

Sukrisno, Agoes (2004). Auditing pemeriksaan Akuntan oleh KAP.

Sanjaya Sari Wulan Made Ni, (2013), Penerapan Audit Manajemen Keuangan pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia SC Siangaraja, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha.

Tupoksi Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar, 2019.

Veranika, (2005), Audit Manajemen fungsi keuangan, jurusan akuntansi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, tidak dipublikasikan.

Yusup Mulana, 2014. Audit Manajemen Jurnal Majalah Bisnis dan Iptek STIE Pasundang Bandung. Vol. 7, No, 2.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Informan

Tanggal Wawancara : 29 Juli 2019

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar

Identitas Informan

1. Nama : Bapak Henra Cipta
2. Umur : 40
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Pendidikan formal : S1
5. Pekerjaan : Kepala sub bagian ADUM

Hasil Wawancara

1. Apakah seluruh pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah melakukan tugas dan tanggungjawabnya pak?

Jawab:

Ya seluruh pegawai pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah melaksanakan tupoksi serta tanggungjawab mereka masing-masing.

2. Apakah dalam penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran sudah didukung data-data yang akurat?

Jawab:

Dalam penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran sudah didukung data-data dari tahun sebelumnya seperti kerangka acuan data.

3. Apakah ada jadwal pertemuan antara kepala bidang dan divisi lain dalam penyusunan perencanaan tahunan?

Jawab:

Yah ada jadwal pertemuan antara kepala sub bagian serta divisi lain atas penyusunan perencanaan tahunan.

4. Bagaimana pak jika terjadi sesuatu dengan kondisi keuangan kantor, apakah pihak kantor melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan?

Jawab:

Pihak kantor tidak melaporkannya kepadapihak yang bersangkutan apabila terjadi dengan kondisi keuangan kantor.

5. Apakah data dan laporan yang dibuat oleh pegawai keuangan sudah tepat?

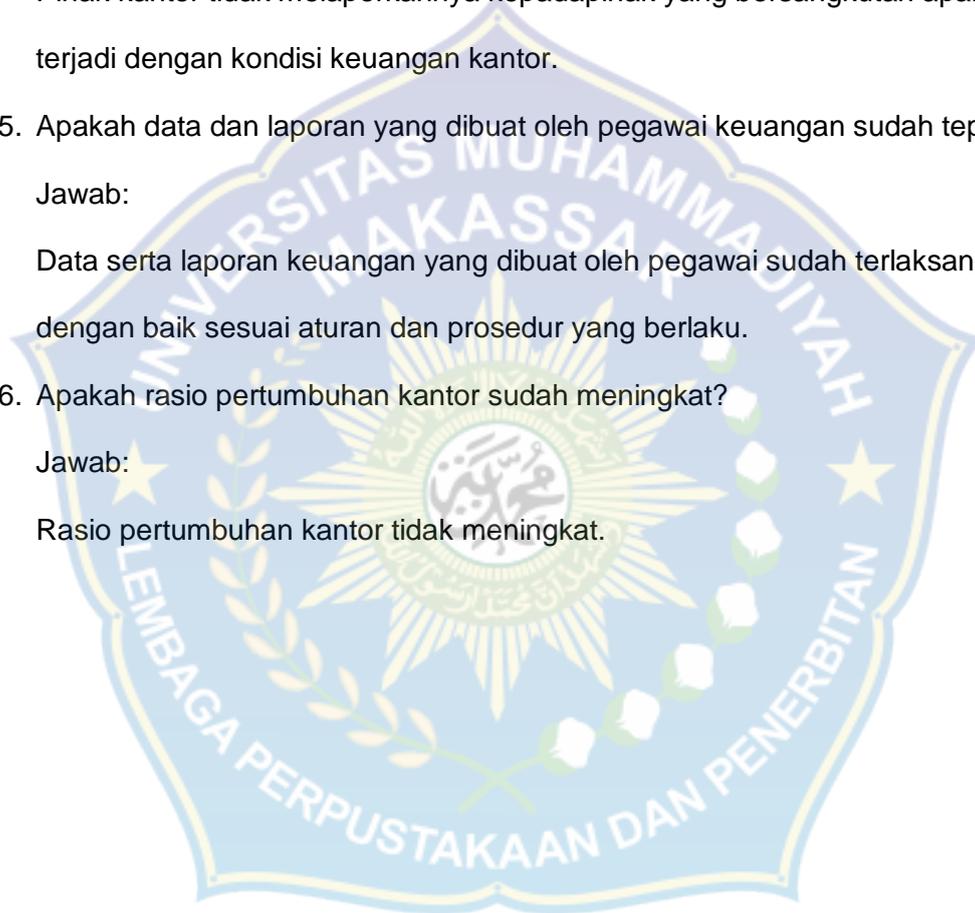
Jawab:

Data serta laporan keuangan yang dibuat oleh pegawai sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

6. Apakah rasio pertumbuhan kantor sudah meningkat?

Jawab:

Rasio pertumbuhan kantor tidak meningkat.



RIWAYAT HIDUP



Serlinawati, dilahirkan di Kel. Bontoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto pada tanggal 13 Juni 1993. Anak ketiga dari tiga bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Hadding dan Jumasari. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2000 sampai 2005 di SD Negeri 84 Ganrag-ganrang. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Binamu, tamat pada tahun 2008 pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Binamu tamat pada tahun 2011 kemudian pada tahun yang sama, penulis diterima pada Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.